

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Azhar. *Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Sriwijaya: Jambi. (2017).

Bagir Manan dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni, Bandung. (1997).

Bagir Manan. *Hakim sebagai Pembaharu Hukum dalam Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta. (2009).

Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, (2003).

Djenal Hoesen Koesoemahatmadja. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jilid 2. Bandung. Citra Aditya Bhakti. (1990).

Enrico Simanjuntak. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika, (2021).

Hari Sugiharto, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Hukum Publik oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. (2017).

I. Made Pasek Diantha, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, Jakarta. (2016).

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. CV Mulia Sari, Jakarta. (1991).

Irwansyah. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, (2020).

Marbun SF. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta. (2011).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta. (2005).

- Priyatmanto Abdoellah. *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. (2016).
- R. Wiyono. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika: Jakarta. (2008).
- Ridwan & Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, Bandung. (2020).
- Ridwan, Ir H. Juniarto, dan M H Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, (2020).
- S.F. Marbun dan Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta. (2006).
- Sjachran Basah, *Menelaah Liku-liku RUU tentang PTUN*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, (1984).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. (2003).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. 1(1986).
- Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung, Alumni, (2016).
- Tedi Sudrajat, S. H., and S. H. Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, (2021).
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, *Kajian Isu-Isu Strategis di Bidang Sistem dan Hukum Administrasi Negara*, Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. (2015).
- Tri Cahya Indra Permana. *Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Genta Press. (2016).
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika, Jakarta. (2022).

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. (2019).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara dan diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian  
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya  
Administratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Risalah pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan. Pandangan/Penjelasan Presiden/Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Komisi II DPR RI. Selasa, 25 Februari 2014. DPR RI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta, 2014.

Hasil Rumusan Diklat Kapita Selekta Sengketa TUN bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, tanggal 19 Maret s.d. 25 Maret 2017.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*. DPR RI, 2014.

## JURNAL DAN MAKALAH

- Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, dan Nathanael Grady. "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018).
- Ali, Firlil Fahresi Arfaisal. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021).
- Andri Wahyudi. "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021).
- Anggoro Firna Novi. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016).
- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014).
- Arta, I. Komang Kawi, and I. Gede Arya WiraSena. "Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Di Keluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Kertha Widya* 9, no. 2 (2022).
- Arwanto Bambang. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." *Jurnal Yuridika* 31, no. 3 (2016).
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." PhD diss., Brawijaya University, 2018.
- Candra, Mardi, Ismail Ismail, and Fally Avriantara. "Mengoptimalkan Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (2023).

Devi Melissa Silalahi. "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020).

Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti. "Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020).

Dikdik Somantri. *Arah Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP)*. Makalah dalam rangka Lomba Karya Tulis Ilmiah Dwi Dasawarsa Peratun.

El Guyanie, Gugun. "Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021).

Fauzani, Muhammad Addi, dan Fandi Nur Rohman. "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2020).

Habib Ferian Fajar. "Menjamin Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Seleksi Hakim Konstitusi Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar 1945." *JURIS: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 13 No. 1 (2023). hlm. 77.

Hadi Syofyan. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017).

\_\_\_\_\_. "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016).

Herman dan Hendry Julian Noor. "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017).

Hudoprakoso, Pulung. "Pemberlakuan Upaya Administrasi Sebagai Primum Remidium Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2022).

Ilham, Ach Nadzirun. "Peran PTUN Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum." *Dinamika* 28, no. 9 (2022).

Khoirul Huda. "Pertanggungjawaban hukum tindakan mal-administrasi dalam pelayanan publik." *Jurnal Heritage* 2, no. 2 (2014).

Lailam, Tanto. "Penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).

Listyarini, Lisa, and Gandes Candra Kirana. "Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional (studi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG)." *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 1 (2021).

Muhammad Ansori Lubis, Ria Sinta Dhevi, dan Muhammad Yasid. "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (2020).

- Nasir, Cholidin. 2018. "Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme citizen Lawsuit". *Jurnal Konstitusi* 14 (4).  
<https://doi.org/10.31078/jk14410>
- Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015).
- Palilingan, Toar Neman, Cobi Elisabeth M. Mamahit, dan Syamsia Midu. "Tantangan dan Perkembangan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan." *Amanna Gappa* (2023).
- Pattinasarany, Yohanes. "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi." *Jurnal Saniri* 3, no. 1 (2022).
- Putra, Hendra Catur. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2022).
- Rahayu, Sri. "Hak tertuduh dalam peradilan pidana berdasarkan adversary system." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).
- Randang, Ivan S. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan." *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016).
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, dan Fauziyah Putri Meilinda. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023).
- Riza, Dola. "Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Admnistrasi Pemerintahan." *Soumater Law Review* 2, no. 2 (2019).



Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa'adah. "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021).

Salam Syukron. "Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018).

Sudarsono, Retno Ariyani, dan Agus Abdur Rahman. "Modifikasi Hukum oleh Mahkamah Agung Melalui Pengaturan Upaya Adminitratif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018." *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 1 (2019).

Sudarsono, "Upaya Administratif dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," Makalah disampaikan dalam Colloqium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Garden Palace Surabaya, 5 Juni 2015.

Sudiarawan, Kadek Agus, and Bagus Hermanto. "Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Prapemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019).

Susilo Agus Budi. "Makna dan kriteria diskresi Keputusan dan/atau tindakan pejabat publik dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015).

\_\_\_\_\_. "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).

Thalis Noor Cahyadi, "Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 Nomor 1, (2013).

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014).

Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, no. 1 (2012).

## INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Sengketa*. Diakses pada tanggal 18 November 2023 dari <https://kbbi.web.id/sengketa>.

